



Perbup APBD 2020 Tidak pro Rakyat

Amurang, KOMENTAR

Anggaran APBD 2020 yang rencananya ditetapkan lewat Peraturan bupati (Perbup) dikarenakan tidak melalui pembahasan bersama DPRD. Dari bocoran yang diperoleh, rancangan di tahun terakhir pemerintahan Bupati Christiany Euginia Paruntu hanya menganggarkan Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebesar Rp 3,5 miliar. Turun jauh dibanding tahun lalu yakni Rp 18 miliar.

Jamkesda yang memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat lewat BPJS Kesehatan lebih rendah dari dana hibah yang total dianggarkan Rp 76,9. Bahkan bila dibandingkan dengan

Tunjangan PNS di salah satu SKPD yang mencapai Rp 6 miliar. Tak pelak bila dikatakan bila APBD kali ini tidak pro pada kerakyatan.

"Kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Apalagi dengan terus meningkatnya biaya pengobatan. Sehingga bila anggaran Jamkesda diperas lebih dari 50 persen, sudah pasti berdampak bagi masyarakat secara luas. Tentu akan disayangkan. Apalagi ada anggaran-anggaran lain yang fantastis, jauh di atas Jamkesda," ujar Sonny Najoan selaku tokoh masyarakat.

Dia juga menyorot besarnya anggaran infrastruktur serta hibah. Menurutnya walaupun ada Pilkada yang

menyedot anggaran besar yang dari informasi lebih dari Rp 70 miliar, infrastruktur sebaiknya ditekan. Begitu pula dengan anggaran perjalanan dinas dan berbagai tunjangan yang melekat pada kepala daerah.

"Kita lihat saja tahun lalu Jamkesda dengan anggaran Rp 18 miliar diinformasikan mengikutsertakan 70 ribu warga. Nah kalau ini anggaran Rp 3,5 M akan ada puluhan warga tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan sesuai UU seluruh warga negara wajib ikut atau tertanggung kepesertaan di BPJS," terangnya.

Sementara itu Orwin Tengor anggota DPRD dari Fraksi Primanas menyebut-

kan APBD merupakan cermin dari berpihak atau tidaknya pada masyarakat. Seharusnya apa yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat harus mendapat tempat utama.

"Kami dari Primanas sudah berupaya agar APBD dibahas bersama eksekutif dan legislatif. Sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Tapi kami selaku perwakilan masyarakat 'terpasung' tidak dapat menjalankan fungsi memperjuangkan nasib masyarakat lantaran ada fraksi memboikotnya. Kita tahu bersama AKD yang menjadi alat DPRD menjalankan tugas termasuk membahas APBD sampai sekarang 'dipetieskan'," pungkaskannya.^(vii)